

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. YANI NOMOR 16 Telp. (0286) 591218

BANJARNEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pada gambaran umum ini akan kami uraikan tentang *Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banjarnegara*, sebagai berikut :

1) Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan *Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu *membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

2) Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tergambarkan dalam Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Banjarnegara, terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- III. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi Seksi :
 - Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - Seksi Pelayanan Komunikasi.
- IV. Bidang Penyelenggaraan E-Government meliputi Seksi :
 - Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.
- V. Bidang statistik dan Persandian meliputi Seksi :
 - Seksi Statistik; dan
 - Seksi Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 didukung dengan personil berjumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang PNS, 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 8 (delapan) orang THL (Tenaga Harian Lepas), dan 14 (empat belas) orang Out sourcing.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika hingga akhir bulan Desember 2021 sejumlah 50 orang, terdiri dari 16 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 32 persen dan 34 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 66 persen.

Demikianlah gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi dengan baik, permasalahan itu antara lain :

1. Sistem informasi/aplikasi baik untuk administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik masih sangat sedikit yang terintegasi.
2. Masih rendahnya Indeks SPBE yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi

Birokrasi.

3. Dokumen kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi SPBE masih banyak yang belum tersusun.
4. Belum terbangunnya fasilitas jaringan internet desa WAN/LAN ke jaringan Banjarnegara Online.
5. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
6. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
7. Keterbatasan SDM yang menangani pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat
8. Data center yang belum dilakukan pembaharuan sejak diadakan
9. Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Indonesia Daerah
10. Keamanan informasi keamanan aplikasi belum mendapat perhatian yang cukup
11. Belum optimalnya pemerdayaan komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi (KIM dan FK METRA mati suri)
12. Perlunya peninjauan kembali Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya iklan di LPPL Radio Suara Banjarnegara
13. Belum optimanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja OPD.
14. Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan laporan capaian ikhtisar kinerja (SAKIP)
15. Masih kurangnya penyediaan wifi pada fasilitas umum.
16. Belum optimalnya pengelolaan website di perangkat daerah
17. Personil Fokohumas di tiap OPD belum aktif dalam mengirimkan berita kegiatan OPD masing-masing untuk ditayangkan di website banjarnegarakab.go.id
18. Belum optimalnya perangkat daerah dalam mengupdate data dalam portal open data
19. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

2. Isu Strategis.

Isu-isu strategis Bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1. Keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat. Di samping itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana

yang memadai untuk membuat konten informasi.

2. Dalam rangka implementasi SPBE dari 6 dokumen arsitektur SPBE baru 2 dokumen yang tersusun, yaitu dokumen Proses Bisnis dan Arsitektur Infrastruktur. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk SPBE dan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 tentang SPBE diperlukan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan publik maupun non publik. Untuk itu diperlukan pengintegrasian SIM/aplikasi yang terkendala belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM yang sesuai standar.
3. Kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah perlu ditingkatkan. Dengan adanya Perbub tentang Satu Data Indonesia Daerah diperlukan kerja sama yang baik dari Pembina Data (BPS), Koordinator Forum Satu Data (Baperlitbang), Wali Data (Dinkominfo) dan produsen data di masing-masing OPD dalam menyediakan data yang berkualitas dan siap berbagi pakai.
4. Keamanan informasi maupun aplikasi dari serangan cyber harus ditingkatkan dengan membangun Sistem Keamanan Informasi. Di samping itu diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan informasi dan peningkatan SDM yang menangani persandian.

Sedangkan lingkungan strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara terdiri dari dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis tersebut perlu diantisipasi agar tidak mempengaruhi kinerja lembaga, baik yang bersifat positif untuk terus dikembangkan dan yang bersifat negatif untuk dihindari.

Mendasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah guna mendukung Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Strategis organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik dapat kita lihat pada **5 (lima) sasaran strategis** yang hendak dicapai yakni :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian;
4. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat;
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah/Meningkatnya nilai akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mencapai **sasaran** tersebut diatas maka ditetapkan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019, yaitu :

1. Program Aplikasi Informatika, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
 - 1.1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
 - 1.2 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan tersebut diatas didukung dengan pelaksanaan 25 (dua puluh empat) kegiatan yang terbagi pada :

a.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	:	6 Sub Kegiatan	Rp.	1.278.777.300
b.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	:	5 Sub Kegiatan	Rp.	2.656.016.700
c.	Bidang Statistik dan Persandian	:	2 Sub Kegiatan	Rp.	337.918.600
d.	Sekretariat	:	12 Sub Kegiatan	Rp.	3.658.573.400
Jumlah				Rp.	7.931.286.000
				.	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022

Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017 - 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Perencanaan strategis ini juga mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu menuju Kabupaten ***“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”***.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara, selaras dengan RPJM Nasional 2017 - 2022 dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2005 – 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang akan datang. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara memiliki harga diri yang lebih, saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional.

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan setiap pokok visi yang ada di dalamnya dimana terdapat 2 (*dua*) *pokok visi* yaitu :

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini

ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 khususnya **Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik**. Maka diperlukan tujuan dan sasaran dari OPD yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika, menetapkan tujuan, dan sasaran, program sebagai berikut :

1. Tujuan :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.
- 2) Meningkatkan Pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City.
- 3) Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara.
- 4) Meningkatkan Pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

2. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan, yakni :
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
 - b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap E-Government untuk Keterbukaan Informasi Publik, sasaran ini akan dicapai dengan 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan, yakni :
 - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 3) Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Disini akan kami sampaikan ***Ringkasan/Ikhtisyar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021***, yang memuat informasi semua komponen dalam mencapai ***sasaran sesuai indikator kinerja*** yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 khususnya **Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.**

Kemudian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2021, dengan Alokasi Anggaran murni sebesar **Rp. 8.296.486.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Dengan tujuan utamanya **“Meningkatkan pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City”** Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas/Eselon II, dengan 5 (lima) sasaran strategis yang juga telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan Indikator Kinerja : **“Nilai Indeks SPBE”** dengan target **2,50**;

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : “**Nilai Keterbukaan Informasi Publik**”, dengan target **81**;
3. Meningkatnya kualitas layanan persandian, dengan indikator kinerja : “**Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi**”, dengan target **50%**;
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dengan Indikator : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**, dengan target NILAI sebesar **79**;
5. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah, dengan indikator : Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah dengan target nilai : **B**.

Sedangkan rincian target Penetapan Kinerja dari masing-masing indikator kinerja Dinas (Eselon II) dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi		
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks SPBE	2,50
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap e-Government untuk keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	81
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan persandian	Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi	50%
2	Terwujudnya pelayanan prima		
1.	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B
	5 Sasaran	4 Indikator	

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada Perubahan Anggaran, namun demikian ada perubahan/pengurangan sebesar **Rp. 365.200.000,-** sehingga anggaran menjadi sebesar **Rp. 7.931.286.000,-** (*Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, adapun Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya 5 (lima) sasaran strategis tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Realisasi sampai Pada akhir Tahun Anggaran 2021, menunjukkan bahwa 5 (lima) sasaran strategis tersebut, 3 (tiga) sasaran strategis telah memenuhi target dan 2 (dua) sasaran strategis tidak memenuhi target.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dilakukan dengan cara menyajikan *rincian hasil pengukuran kinerja Organisasi* dengan menganalisis *tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran*.

Adapun Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003.

Ada 2 (dua) rumus yang bisa digunakan, namun kami hanya memilih menggunakan rumus yang pertama yakni : *Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja*, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\sum \text{Realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100$$

Kemudian melakukan *analisis capaian kinerja dimaksud dengan :*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (*Tahun terakhir*);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (banyak perangkat daerah yang tidak mencantumkan perbandingan dengan standar nasional);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; (ketercukupan SDM dan Sarpras bukan menjadi alasan dalam pencapaian/ketidapcapaian);
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
(Berapa program/kegiatan yang hilang/dipangkas dan berapa anggaran yang dihemat. Melihat program/kegiatan tahun sebelumnya dengan program/kegiatan tahun sekarang, dibandingkan Capaian Kinerja dengan anggaran yang digunakan);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (pada indikator sasaran).

Adapun dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Indeks SPBE**, dengan target nilai 2,50. Melalui evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB tahun 2021 diperoleh nilai 2,42 sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,8 persen ;
2. Sasaran strategis yang ke dua yaitu : *Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Keterbukaan Informasi Publik**, dengan target nilai 81. Melalui penilaian mandiri diperoleh nilai 91, sehingga Capaian Kinerjanya mencapai 112,35 persen;
3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu : *Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian*, dengan Indikator Kinerja : **Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi**, dengan target 50%. Tahun 2021 melalui persiapan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), realisasi sasaran sebesar 25% sehingga capaian kinerjanya 50 persen.
4. Sasaran strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat*, dengan Kinerja : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dengan target nilai 79 tercapai nilai 83,75 sehingga capaian kinerjanya adalah 106,01 persen;
5. Untuk sasaran strategis yang ke empat yaitu : *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** dengan target predikat kategori B. Target tersebut di tahun 2021 bisa tercapai dengan nilai di 60,30, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 100,48 persen.

Kemudian dari uraian diatas, secara umum menunjukkan hasil yang baik, kemudian secara singkat dapat dijelaskan secara terperinci capaian kinerja tiap-tiap indikator sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
-------------	--

Sasaran 1 : ”*Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat*”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : *Nilai Indeks SPBE*, yang pada tahun 2021 ditargetkan nilai 2,50. Indikator ini dipilih untuk mengukur sasaran 1 sesuai hasil review terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada tahun 2019. Alasan pemilihan indikator ini karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi untuk memberikan layanan kepada pengguna diantaranya pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan evaluasi setiap tahun baik secara mandiri maupun oleh Menpan RB. Pada tahun 2021 melalui penilaian mandiri diperoleh nilai Indeks SPBE 2,42 sehingga belum memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu 2,50. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Indeks SPBE	2,50	2,42	96,8

Penilaian SPBE dilakukan terhadap 3 domain yaitu Kebijakan, Tata Kelola dan Layanan. Nilai dari masing-masing domain adalah sebagai berikut :

No	Domain	Indeks
1	Kebijakan	3,40
2	Tata Kelola	2,00
3	Manajemen	1,00
4	Layanan	2,88
	Indeks SPBE	2,42

Nilai yang dicapai pada tahun 2021 ini menempatkan Banjarnegara pada posisi peringkat 26 dari 25 kabupaten/kota se Jawa Tengah dan termasuk pada kategori cukup.

Meskipun nilai turun akan tetapi peringkat naik, hal ini dikarenakan hampir semua instansi Pemerintah Daerah mengalami penurunan nilai Indeks SPBE yang disebabkan variabel penilaian yang bertambah. Hal yang sudah dicapai berkaitan dengan SPBE di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah penyusunan Masterplan SPBE, Perda Nomor 50 Tahun 2021 tentang SPBE, Dokumen arsitektur Proses Bisnis dan Dokumen Arsitektur Infrastruktur. Kemudian capaian kinerja di analisis dengan :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks SPBE	2,50	2,42	96,8

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 mencapai 96,8 %.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila realisasi kinerja dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	5	5	4	5	6	7	8
1	Nilai Indeks SPBE	1,93	100	2,52	109,57	2,42	96,8

Meskipun Nilai Indeks SPBE ditetapkan sebagai indikator Sasaran Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2019, namun karena penilaian SPBE sudah dilaksanakan mulai tahun 2018 maka dapat diperbandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih belum mencapai nilai 2,60 yang masuk kategori baik, namun demikian dapat kita lihat Nilai Indeks SPBE pada 2 (tahun)

pertama trennya mengalami kenaikan. Penurunan nilai yang dialami oleh hampir semua Instansi Pemerintah Daerah disebabkan adanya penambahan variabel penilaian.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA OPD, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	%
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	2,75	2,42	88,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 dibanding Target akhir Renstra OPD adalah 88,00 sehingga masih kurang 12,00 untuk mencapai target akhir Renstra. Artinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Perlu ada upaya yang sistematis agar SPBE di Kabupaten Banjarnegara mencapai tahapan dengan kategori baik.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN;

Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas karena didukung dengan :

1. Sudah tersusunnya Masterplan SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE.
2. Sudah tersusunnya Perda No. 50 Tahun 2021 tentang SPBE sebagai payung hukum pelaksanaan SPBE
3. Koordinasi yang baik antara beberapa OPD yang menangani SPBE sesuai dengan bidang tugasnya (Dinas Komunikasi dan Informatika, Baperlitbang, Bagian Organisasi, Bagian Hukum)
4. Banyaknya OPD yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara online atau melalui aplikasi

5. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada;
6. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan OPD se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan e-government yang dilaksanakan;
7. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya kegiatan.

Namun demikian ternyata tetap saja terdapat Permasalahan dalam pencapaian indikator antara lain yaitu :

1. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih sulit dilaksanakan dikarenakan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM, sehingga belum terdapat standarisasi Pembangunan SIM.
2. Pusat Data Pemerintah (Data Center) yang belum memenuhi standar nasional.
3. Belum semua stakeholder memahami pentingnya implementasi SPBE dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Adapun solusi dalam rangka mengatasi terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Menyusun regulasi yang mengatur pembangunan SIM/aplikasi yang sesuai standar, sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait yang masuk dalam Tim Koordinasi SPBE dalam rangka implementasi SPE sesuai Masterplan SPBE.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika.
4. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain diluar Pemda)
5. Dukungan Anggaran dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Pelayanan kepada Masyarakat didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.656.016.700,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 2.352.420.134,- (88,57%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 303.596.566,- (11,43%), hal ini disebabkan terdapat sisa kontrak/ efisiensi pada pengadaan peralatan command center, sewa bandwidth, dan jasa konsultan penyusunan dokumen SPBE dan support TNDE. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Aplikasi Informatika	2.656.016.700	2.352.420.134	88,57	100	303.596.566	11,43
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.281.049.900	1.181.267.534	92,21	100	99.782.366	7,79
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.281.049.900	1.181.267.534	92,21	100	99.782.366	7,79
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.374.966.800	1.171.152.600	85,18	100	203.814.200	14,82
2	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.087.600	7.056.600	77,65	100	2.031.000	22,35

3	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	302.289.000	203.722.500	67,39	100	98.566.500	32,61
4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	338.229.700	286.579.700	84,73	100	51.650.000	15,27
5	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	725.360.500	673.793.800	92,89	100	51.566.700	7,11

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA. (PADA INDIKATOR SASARAN).

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dicapai melalui 1 (satu) Program dengan 4 (enam) kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Aplikasi Informataika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik

			4. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
			5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Adapun program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja adalah Program Aplikasi Informatika dan subkegiatannya adalah Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sasaran 2 :	Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik
-------------	--

1. Sasaran 2 : ” *Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik*”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Nilai Keterbukaan Informasi Publik*, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	81	91	130%

Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan nilai yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang meliputi penilaian website konten informasi publik wajib berkala, penilaian Self Assesment Quisionare (SAQ), hasil visitasi verifikasi dan hasil uji publik oleh penilai. Tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara hanya dinilai pada tahap 1 dan 2, yaitu Penilaian tahap 1 terhadap website konten informasi publik wajib berkala dengan nilai 90 dan penilaian tahap 2 melalui penilaian quesioner mandiri memperoleh nilai 92. Untuk tahap selanjutnya hanya diikuti oleh 19 kabupaten/kota. Sehingga belum dapat diketahui hasil akhir dari nilai keterbukaan informasi publik Kabupaten Banjarnegara. Penilaian terhadap website dilakukan dengan menilai website yang menampilkan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala. PPID Utama berperan penting dalam hal menkkordinasi PPID perangkat daerah agar disiplin dalam membuat dan menayangkan Daftar Informasi Publik yang ada di dinas masing-masing.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 pada Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70	91	112,35%

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik dengan 1 Indikator capaiannya mencapai 112,35%.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan Nilai Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, sehingga baru bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020.

Indikator Kinerja		2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			91	130%	91	112,35 %
	1 Indikator	-	-	-	-		-

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2021, dapat melampaui target.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2022	Realisasi 2021	%
1	2	3	9	10
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	91	101,11%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada;
2. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan OPD beserta seluruh lapisan masyarakat se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan penyebarluasan informasi yang dilaksanakan;
3. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya kegiatan.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi yang sudah dibentuk (KIM, FK METRA) tidak ada pembinaan secara berkesinambungan sehingga belum bisa berperan aktif dalam rangka desiminasi informasi.
2. Belum optimalnya peran PPID dan Fokohumas di tingkatan OPD dalam menyediakan informasi pembangunan kepada masyarakat
3. Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah

Solusi terhadap permasalahan :

1. Menghidupkan kembali KIM dan FK METRA sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam penyediaan data dan informasi.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2, Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan di bidang Statistik dan Persandian. Di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang didukung dengan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan total anggaran sebesar Rp. 1.278.777.300,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 1.228.978.578,- (96,11%) dan realisasi fisik sebesar 97,50%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 49.798.722,- (1,39%). Hal ini disebabkan terdapat sisa kontrak/ efisiensi pada pengadaan pemancar FM, honor penyiar radio karena ada yang mengundurkan diri pada akhir tahun, honor narasumber dan MC serta makan minum rapat yang tidak jadi dilaksanakan. Adapun Program yang mendukung capaian kinerja Sasaran 2 di Bidang Statistik dan Persandian adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 95.085.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 88.166.250,- (92,72%) dan realisasi fisik sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 6.918.950,- (7,28%). Efisiensi/sisa anggaran ini berasal dari belanja cetak dan makan minum rapat. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.278.777.300	1.228.978.578	96,11	97,50	49.798.722	1,39
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.278.777.300	1.228.978.578	96,11	97,50	49.798.722	1,39
1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	85.669.900	82.069.900	95,80	100	3.600.000	4,20
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	321.505.800	312.651.800	97,25	100	8.854.000	2,75
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	448.585.400	423.549.978	94,42	100	25.035.422	4,58
4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	17.524.100	6.021.200	34,36	85	11.502.900	50,64
5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	372.197.600	371.914.600	99,92	100	283.000	0,08
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	33.294.500	32.771.100	98,43	100	523.400	1,57
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	95.085.200	88.166.250	92,72	100	6.918.950	7,28
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	95.085.200	88.166.250	92,72	100	6.918.950	7,28
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	95.085.200	88.166.250	92,72	100	6.918.950	7,28

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 2 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik, dicapai melalui 1 (satu) program, 1 kegiatan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
			2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			4. Pelayanan Informasi Publik
			5. Layanan Hubungan Media
			6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sasaran 3 :	Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian
-------------	--

Sasaran 3 : ”*Meningkatnya kualitas Layanan Persandian*”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi*, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi	50%	25%	50%

Indikator Persentase OPD yang Menggunakan Persandian sebagai Pengamanan baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 sebagai hasil review terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika, Indikator ini dipilih atas dasar pemikiran pengamanan informasi merupakan hal yang sangat diperlukan saat ini mengingat hampir semua informasi disediakan melalui aplikasi atau sistem informasi. Untuk itu diperlukan pengamanan informasi yang ada di semua OPD melalui persandian. Aplikasi surat dinas elektronik (TNDE) yang digunakan oleh semua OPD dan beberapa lembaga di sekitar Kabupaten menjadi sasaran pertama yang akan diamankan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan surat dinas di lingkungan Pemkab oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sasaran OPD yang akan menerapkan TTE 25 % atau sebanyak 11 OPD. Hal ini sudah diawali dengan koordinasi BSSN sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan pengamanan informasi melalui persandian dan sosialisasi kepada 11 OPD sebagai sasaran

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 pada Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi	50%	25%	50%

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Persandian dengan 1 Indikator capaiannya 50%. Tidak tercapainya sasaran tersebut dikarenakan aplikasi tanda tangan elektronik (TTE) yang sedianya mulai dilaksanakan pada tahun 2021, sampai bulan desember baru sampai tahap persiapan penandatanganan MOu dengan BSSN.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, sehingga belum bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahu-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi			25	100%	50	50%
	1 Indikator	-	-	-	-		-

Berdarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2021, belum memenuhi target.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2022	Realisasi 2021	%
1	2	3	9	10
1.	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi	60%	25%	41,67%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang belum berhasil tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM persandian yang masih kurang;
2. Sistem Keamanan Informasi yang belum terbangun;
3. Kendala non teknis pandemi covid 19 mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penerapan TTE

Solusi terhadap permasalahan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang persandian dan telekomunikasi;
2. Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait ;
3. Penganggaran kembali pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, Meningkatnya Kualitas Layanan , didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan di di bidang Statistik dan Persandian, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 242.833.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 236.697.400,- (97,47

%) dan realisasi fisik sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 6.918.950,- (7,28%). Efisiensi/sisa anggaran ini berasal dari sisa pengadaan peralatan PABX dan makan minum rapat. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi						
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	242.833.400	236.697.400	97,47	100	6.136.000	2,53

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 3 : *Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian*, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sasaran 4 :	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
-------------	---

Sasaran 4 : ” Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat ”,

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “*Nilai Survey Kepuasan Masyarakat*”. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	79	83,75	106,01%

Indikator Kinerja yang mendukung meningkatnya survey kepuasan masyarakat dapat kami ilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Indikator ke 1 (satu) yaitu Nilai Survey Kpuasan Masyarakat pada tahun 2021 diperoleh nilai 83,75 dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1.	Persyaratan	3,278
2.	Prosedur	3,341
3.	Waktu Pelayanan	3,107
4.	Biaya / Tarif	3,894
5.	Produk Layanan	3,340
6.	Kompetensi Pelaksanaan	3,362

7.	Perilaku Pelaksanaan	3,214
8.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,575
9.	Sarana dan Prasarana	3,064

Pada tabel tersebut diatas diperoleh nilai indeks untuk pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 3,34 dan setelah dikonversikan dengan nilai nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 83,75 dengan mutu pelayanan Baik. Namun dari 9 unsur penilaian yang hasilnya kurang memuaskan adalah dari unsur Sarana dan Prasarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat memenuhi target nilai 83,7, namun masih perlu peningkatan pelayanan khususnya pada unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
2. pelayanan perlu disederhanakan sehingga memudahkan bagi pengguna layanan.
3. Prosedur pelayanan. Tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan untuk lebih disederhanakan.
4. Waktu pelayanan. Jangka waktu yang diperlukan untuk setiap menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan untuk lebih diefisiensikan waktunya.
5. Produk Pelayanan. Produk pelayanan yang di hasilkan untuk dievaluasi agar lebih tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kenyamanan Tempat layanan. Belum tersedianya tempat layanan yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung secretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Fasilitas tempat tunggu. Belum tersedianya tempat tunggu yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung sekretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Perilaku pelaksana. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan lebih baik lagi bagi pengguna layanan.
9. Maklumat Pelayanan. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart masih perlu ditingkatkan.

10. Penanganan Pengaduan. Penanganan pengaduan dan tindak lanjut masih perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi agar pengaduan tersebut bisa segera tertangani.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Indikator Kinerja		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,5	79,6	79	81,23	79	83,72	79	83,75

Indikator Kinerja		2018		2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	7	8	5	6	7	8
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,6	101,78 %	81,23	102,82 %	83,72	105,97 %	83,75	106,01 %

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	83,75	104,69%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2022 untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Nilai 80, telah terlampaui pada Tahun 2021 ini.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan OPD/SKPD beserta instansi terkait;
2. Komiten dari aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum ada gedung kantor dan peralatan yang memadai
2. Kurangnya SDM khususnya di bidang tehnis IT, programmer dan jaringan, SDM persandian dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Tersedianya sarara dan prasarana gedung kantor yang memadai sesuai unsur pelayanan;
2. Penambahan SDM dan peingkatan SDM di bidang IT.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, didukung oleh 1 program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan di Sekretaiat. Program yang mendukung capian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 3.656.386.900,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 3.439.507.354,- (94,07%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 218.795.466,- (5,93%). Hal ini disebabkan terdapat sisa belanja/ efisiensi pada komponen tamsilpeg PNS dan tunjangan fungsional, belanja listrik/telepon dan belanja perjalanan dinas. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.656.386.900	3.439.507.354	94,07	100	218.795.466	5,93
	Kegiatan Administrasi Keuangan	2.982.408.558	2.872.075.991	96,30	100	110.332.567	3,70
1	Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.408.558	2.767.075.991	96,17	100	110.332.567	3,83
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000	105.000.000	100	100	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.320.600	180.289.736	69,52	100	79.030.864	30,48
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.172.200	10.172.200	100	100	0	0
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.548.400	145.517.536	64,80	100	79.030.864	35,20
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.600.000	24.600.000	100	100	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.192.862	234.175.197	89,66	100	27.017.665	10,34
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	40.971.393	62,08	100	25.028.607	37,92
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.192.862	193.203.804	98,98	100	1.989.058	1,02

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.464.880	152.966.430	99,68	100	498.450	0,32
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	114.053.000	114.004.550	99,96	100	48.450	0,04
9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	22.681.880	22.281.880	98,24	100	400.000	1,76
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.730.000	16.680.000	99,70	100	50.000	0,30

6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 4 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, didukung dengan melalui 1 (satu) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan KPD
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat yang memperoleh pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan survey kepuasan yaitu seluruh OPD dan Instansi terkait.

Sasaran 5 :	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
-------------	--

Sasaran 5 : ” Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah”. Untuk mencapai sasaran tersebut diukur dengan satu indikator kinerja yaitu nilai AKIP OPD dengan hasil penilaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

Pada tahun 2021 memperoleh nilai dari 60,30 dengan pencapaian masing-masing komponen penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Rata-rata
1.	Perencanaan kinerja	30%	19,34
2.	Pengukuran kinerja	25%	12,19
3.	Pelaporan kinerja	15%	9,80
4.	Evaluasi internal	10%	3,96
5.	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20%	15,00
Penilaian		100%	60,30

Pada tabel tersebut diatas setelah dikonversi diperoleh nilai sebesar 60,30 dengan kategori B.

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	>60,00	60,30	100,48
	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	B	B	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah Kategori B dengan Nilai di atas 60 (>60), dari hasil Penilaian Tim Sakip Kabupaten Banjarnegara memperoleh Nilai sebesar 60,30 dengan kategori B.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Indikator Kinerja		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	50,5	53,33	>60	55,03	>60	62,69	>60	60,30
	Kategori	C	CC	B	CC	B	B	B	B

Indikator Kinerja		2018		2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	53,33	105,60	55,03	91,70	62,69	104,47	60,30	101,48

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	>60	60,30	101,48%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2022 untuk Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar Nilai Di atas 60 dengan Kategori B, sedangkan pada Tahun 2021 ini telah mencapai nilai 60,30 sehingga sudah melampaui target Renstra 2022.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Sekretariat sebagai penyusun dan pengumpul data SAKIP dengan bidang-bidang ;
2. Komitmen dari Pimpinan dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Belum terdokumentasi dengan baik data-data yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP;
2. Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Penertiban data perencanaan dan evaluasi kinerja;
2. Peningkatan kompetensi SDM perencanaan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5, Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 2.186.500,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 2.186.500,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 0,-. Jumlah anggaran yang sangat kecil dan hanya diperuntukkan makan minum rapat

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan setelah adanya refocusing anggaran honor tim. Efisiensi didapatkan dari pemanfaatan anggaran yang kecil tersebut untuk tetap memenuhi target kinerja 100 %, yaitu tersusunnya dokumen perencanaan 3 dokumen dan dokumen pelaporan sebanyak 7 dokumen. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.186.500	2.186.500	100	100	0	0
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.186.500	2.186.500	100	100	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.074.500	1.074.500	100	100	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.112.000	1.112.000	100	100	0	0

6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 5 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah, didukung dengan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) diperoleh dari evaluasi oleh Inspektorat atas Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Evaluasi ini dilakukan terhadap 5(lima) komponen besar yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hasil Evaluasi dengan nilai 60,30 dengan kategori **B atau Baik** dengan interpretasi Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas bidang keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran.

Untuk alokasi anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 605.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 610.575.061,- sehingga melampaui target sebesar Rp. 5.575.061,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	Surplus/defisit	%
1.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	481.950.243	-18.049,757	96,39
2.	Fasilitas Umum	105.000.000	128.624.818	23.624.818	122,50
Jumlah		605.000.000	610.575.061	5.575.061	100,92

Untuk membiayai operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 mendapat anggaran sebesar Rp. 8.296.486.000,- dan setelah mengalami revisi-revisi termasuk anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika berkurang sebesar Rp. 365.200.000,- sehingga menjadi Rp. Rp. 7.931.286.000,- atau mengalami pengurangan sebesar 4,40%. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 7.347.956.216,- atau sebesar 92,65 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.658.573.400	3.441.693.854	94,07%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.278.777.300	1.228.978.578	97,50%
3	Program Aplikasi Informatika	2.656.016.700	2.352.420.134	88,57%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	95.085.200	88.166.250	92,72%
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	242.833.400	236.697.400	97,47%
	Jumlah	7.931.286.000	7.347.956.216	92,65%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (empat) kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.074.500,00	1.074.500,00	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.112.000,00	1.112.000,00	100
	Administrasi Keuangan			
3	Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.408.558	2.767.075.991	96,17
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000	105.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.172.200	10.172.200	100
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.548.400	145.517.536	64,80
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.600.000	24.600.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	40.971.393	62,08

9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.192.862	193.203.804	98,98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	114.053.000	114.004.550	99,96
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	22.681.880	22.281.880	98,24
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.730.000	16.680.000	99,70
	JUMLAH	3.658.573.400	3.441.693.854	94,07

Total anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.658.573.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.441.693.854,- . Realisasi keuangan yang sebesar 94,077% ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak maksimal terserap dikarenakan di masa PPKM masih ada pembatasan perjalanan dinas luar daerah dan adanya ketentuan perjalanan dinas dalam daerah baru dibayarkan uang harian dengan ketentuan minimal 8 jam Disamping itu ada kelebihan anggaran untuk pembayaran Rekening Telp dan Listrik, karena efisiensi pemakaian dan adanya anggaran yang dicadangkan untuk antisipasi kenaikan tarif listrik.

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	85.669.900	82.069.900	95,80
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	321.505.800	312.651.800	97,25
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	448.585.400	423.549.978	94,42
4	Pelayanan Informasi Publik	17.524.100	6.021.200	34,36

5	Layanan Hubungan Media	372.197.600	371.914.600	99,92
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	33.294.500	32.771.100	98,43
	JUMLAH	1.278.777.300	1.228.978.578	96,11

Total anggaran program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 1.278.777.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.228.978.578,- Realisasi keuangan yang sebesar 96,11% ini disebabkan karena pertemuan untuk membahas uji konsekuensi tidak dilaksanakan sehubungan tidak adanya sengketa informasi honorarium tenaga harian RSPD tidak terambil karena di akhir tahun ada yang mengundurkan diri 1 orang.

Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.281.049.900	1.181.267.534	92,21
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.087.600	7.056.600	77,65
3	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	302.289.000	203.722.500	67,39
4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	338.229.700	286.579.700	84,73

5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	725.360.500	673.793.800	92,89
	JUMLAH	2.656.016.700	2.352.420.134	88,57

Program Aplikasi Informatika Total anggaran sebesar Rp. 2.656.016.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.352.420.134,- . Realisasi keuangan yang hanya sebesar 88,57% ini disebabkan karena pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik yang pada pergeseran anggaran ditambahkan untuk menyusun dokumen arsitektur infrastruktur SPBE tidak jadi dilaksanakan dikarenakan penetapan anggaran pergeseran yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Juga karena adanya efisiensi pada beberapa kegiatan pengadaan peralatan command center, sewa bandwidth, dan jasa konsultan maintenance TNDE.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	95.085.200	88.166.250	92.72

Total anggaran program ini sebesar Rp 95.085.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 88.166.250,- atau sebesar 92,72%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak bisa terambil karena efisiensi anggaran pada belanja cetak dan makan minum rapat.

Program Penyelenggaraan Persaandian dan Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	242.833.400	236.697.400	97,47

Total anggaran program ini sebesar Rp 242.833.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 236.697.400,- atau sebesar 97,47%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya sisa belanja pengadaan peralatan PABX dan anggaran makan minum rapat yang tidak terpakai dikarenakan sosialisasi untuk OPD yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LKjIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara pada tahun anggaran 2021, dengan 5 (lima) Sasaran Strategis serta 5 Indikator Kinerja, sudah cukup baik. Dengan perincian Capaian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Indeks SPBE**, dengan target 2,50 terealisasi 2,42 sehingga Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,8 persen ;
2. Sasaran strategis yang ke dua yaitu : *Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Keterbukaan Informasi Publik**, dengan target 81 terealisasi 91, sehingga Capaian Kinerjanya mencapai 112,35 persen;
3. Sasaran strategis yang keempat yaitu : Meningkatkan Kualitas Layanan Persandian, dengan Indikator Kinerja : **Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi**, dengan target 25%. Tahun 2021 melalui persiapan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) target ini dapat terealisasi sebesar 25%.
4. Sasaran strategis yang ke tiga yaitu : *Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dengan target nilai 79 tercapai nilai 83,75 sehingga capaian kinerjanya adalah 106,01 persen;
5. Untuk sasaran strategis yang ke empat yaitu : *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah** dengan target predikat kategori B. Target tersebut di tahun 2021 bisa tercapai dengan nilai di 60,30, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 100,48 persen.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, rata-rata telah mencapai target target yang telah ditetapkan/direncanakan, hal ini disebabkan :

- a. pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan terarah, sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan ditopang oleh alokasi anggaran yang ada.
- b. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di Bidang Pengembangan E-Government, seperti di Kegiatan Pengembangan E-Government, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, ini sangat mendukung peningkatan kualitas layanan public.

Adapun Pencapaian beberapa target yang belum memuaskan dikarenakan ada beberapa kendala dan hambatan, antara lain :

- a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD;
- c. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD;
- d. Belum adanya aplikasi pelaporan data sektoral yang terintegrasi secara terpadu;
- e. Belum optimalnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar Pemda);
- c. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing OPD;
- d. Mengupayakan tersedianya aplikasi pelaporan data sektoral;
- e. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

Sebagai kata penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banjarnegara Tahun Anggarann 2021, yakni bahwa Tim Kerja kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang ada guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas KOMunikasi dan Informatika Kabupaten banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

Namun demikian apabila dalam penyusunan LkjIP ini dipandang masih terdapat kekurangan kami menerima saran masukan dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Januari 2022

KEPALA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA



R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH., MH.

NIP. 19640217 198607 1 0011

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
- 2) Format LKJIP;